



Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Ngawi

Kresno Sarosa Pribadi¹, Izza Mafruhah¹, Dewi Ismoyowati¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author: dewiismoyowati@staff.uns.ac.id

Abstrak. Korupsi yang dilakukan banyak berhubungan dengan aktivitas pelayanan masyarakat khususnya dalam perijinan, penerimaan pegawai negeri dan pembangunan struktur dan infrastruktur. Persepsi masyarakat ini menjadi penting karena akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai aktivitas pelayanan pemerintah. Survey persepsi masyarakat sebaiknya dilakukan secara rutin oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk evaluasi. Penelitian ini merupakan bagian yang penting dalam evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan public bagi masyarakat. Permasalahan tersebut bisa didefinisikan sebagai berikut :1) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap korupsi secara umum ; 2) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penyimpangan atas pelayanan publik ; 3) Bagaimanakah mendapatkan masukan, kritik dan saran masyarakat luas terhadap pemerintah daerah guna perbaikan di masa mendatang. Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan mixed method yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

1. Pendahuluan

Secara harfiah pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Dalam kenyataannya pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Kondisi pelayanan birokrasi di banyak negara termasuk Indonesia sering menyebabkan rentan terhadap tindak korupsi.

Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih



menitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

Seiring gencarnya kampanye tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, harus diakui bahwa korupsi saat ini bisa dikatakan telah menjadi musuh bersama (common enemy) seluruh masyarakat. Secara umum, masyarakat Indonesia menyadari bahwa korupsi merupakan masalah yang harus diperangi. Mereka sepakat bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan. Korupsi inilah yang menjadi penghambat kemajuan negara dan membuat masyarakat tetap dalam kondisi miskin

Hal ini dapat dilihat dari hasil survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala 10 untuk instansi pusat, sedangkan pada tahun 2008 skor untuk unit pelayanan publik di daerah sebesar 6,69. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya Standard Operating Procedures (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi Negara. Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) lakukan penelitian tentang tren persepsi publik terhadap korupsi. Survei yang dilakukan pada bulan Oktober 2018 di enam provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 responden dengan metode *multisage random sampling*, dengan kesalahan survei atau *margin error* sekitar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen diperoleh hasil bahwa masyarakat mempercayai keseriusan pemerintah terhadap penanganan masalah korupsi. Korupsi yang dilakukan banyak berhubungan dengan aktivitas pelayanan masyarakat khususnya dalam perijinan, penerimaan pegawai negeri dan pembangunan struktur dan infrastruktur. Persepsi masyarakat ini menjadi penting karena akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai aktivitas pelayanan pemerintah. Survey persepsi masyarakat sebaiknya dilakukan secara rutin oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk evaluasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan mixed method yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.1 Ruang Lingkup Penelitian

2.1.1 Waktu dan tempat

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Ngawi dengan mengambil sampel masyarakat yang menggunakan layanan pada pemerintah daerah. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Nopember sebagai indikator pelaksanaan pelayanan pemerintah selama tahun tersebut.

2.1.2 Sampel dan Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Organisasi Pemerintah Daerah khususnya di Pelayanan satu pintu, pelayanan pembayaran pajak, pelayanan di kecamatan dan pelayanan kependudukan. Sampel yang diambil adalah sebanyak 200 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan wawancara yang dipandu dengan kuesioner yang terstruktur .

2.1.3. Teknik Pengambilan sampel

Sampel diambil dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara langsung pada orang yang ditemui saat melakukan kegiatan pelayanan oleh masyarakat. Surveyor akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat atas korupsi. Data yang masuk akan dienumerasi dan diolah sesuai dengan ketentuan indeks persepsi korupsi.

Lokasi pengambilan sampel adalah di beberapa organisasi pemerintah daerah yang secara langsung melakukan pelayanan publik yaitu

1. Pelayanan Terpadu satu pintu
2. Pelayanan pembayaran pajak
3. Pelayanan kependudukan
4. Pelayanan di kecamatan (akan diambil 3 kecamatan)

2.2 Metode Pengolahan Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4, tiap nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

3. Hasil dan Diskusi

Indeks Persepsi Korupsi yang diukur dengan menggunakan 10 kriteria sesuai dengan acuan pengukuran indeks persepsi yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) yaitu (1) Manipulasi terhadap Peraturan Perundangan, (2) Penyalahgunaan jabatan, (3) Memanfaatkan pengaruh, (4) Transparansi Biaya, (5) Biaya tambahan, (6) Meminta hadiah, (7) Transparansi, (8) Praktek Percaloan, (9) Perbuatan Curang, (10) Transaksi Rahasia. Nilai diukur dalam skala 1 sampai dengan 4. Responden akan menilai sesuai dengan persepsi masing-masing kemudian diakumuliskan dan dibuat rerata pada tiap kriteria. Hasil rerata akan dikonversikan sesuai acuan ICW untuk mendapatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi. Hasil wawancara terhadap 169 repsonden di kabupaten Ngawi diperoleh hasil sebagai berikut:

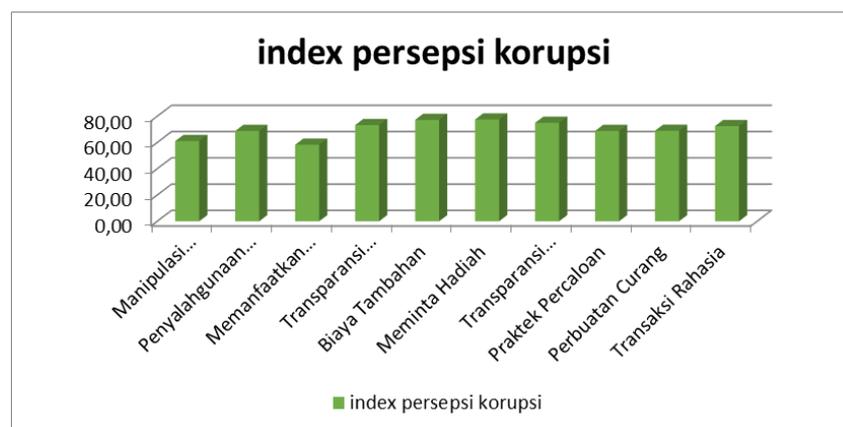
Tabel 3.1. Indeks persepsi korupsi di Kabupaten Ngawi

NO	KRITERIA	NILAI	KONVERSI
1	Manipulasi Peraturan Perundangan	2.44	61.09
2	Penyalahgunaan Jabatan	2.75	68.79
3	Memanfaatkan Pengaruh	2.33	58.28
4	Transparansi Biaya	2.93	73.22
5	Biaya Tambahan	3.09	77.22
6	Meminta Hadiah	3.10	77.51
7	Transparansi Pembayaran	3.00	75.00

8	Praktek Percaloan	2.75	68.79
9	Perbuatan Curang	2.76	68.93
10	Transaksi Rahasia	2.90	72.49
RERATA		2.80	70.10

Sumber : Data primer diolah 2019

Tabel 3.1 tersebut menunjukkan bahwa ternyata rerata Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten Ngawi adalah sebesar 70,10 artinya jauh di atas nilai rerata nasional yang sebesar 60,8. Artinya nilai persepsi korupsi di Ngawi cukup bagus, hal ini mungkin didorong oleh belum pernah adanya kejadian korupsi di Kabupaten Ngawi yang sampai pada level nasional dan tidak mempengaruhi roda pemerintahan. Berdasarkan sebaran indeks persepsi, ternyata nilai terendah adalah pada memanfaatkan pengaruh sebesar 58,28 yang artinya masyarakat menganggap pemberi layanan atau ASN banyak yang memanfaatkan pengaruh atau wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Kriteria berikutnya yang dianggap rentan terhadap korupsi adalah melakukan manipulasi peraturan perundangan sebesar 61,09, artinya masih di atas rerata nasional. Kriteria berikutnya yang dianggap memiliki persepsi rendah adalah praktik percaloan dan penyalahgunaan wewenang yang mempunyai nilai sebesar 68,79. Sedangkan yang dinilai relative tinggi atau bagus oleh masyarakat adalah dalam biaya tambahan, meminta hadian dan transpaeransi pembayaran. Artinya masyarakat menilai bahwa selama ini tidak terdapat atau sangat minimal terjadinya biaya tambahan karena sudah adanya transparansi pembayaran. Transparansi dalam pelayanan pajak, biaya pelayanan umum seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP dan pembuatan berbagai macam dokumen sipil menyebabkan masyarakat merasa tidak adanya pungutan liar yang terjadi dalam proses pelayanan public. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat kabupaten Ngawi merasa bahwa indeks persepsi korupsi di Ngawi bagus. Secara detail IPK kabupaten Ngawi ditunjukkan sebagai berikut :



Gambar 1. Indeks persepsi korupsi di Kabupaten Ngawi

4. Kesimpulan

Korupsi di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan modus, sector, kelembagaan, daerah dan pelaku. Pemahaman korupsi dipilahkan menjadi maksud dengan korupsi, Penilaian terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, penilaian terhadap keadilan hukuman terhadap pelaku korupsi, pemahaman tentang alasan tentang mengapa korupsi masih ada dan terus berulang,

langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah sejak dini dalam pencegahan korupsi, pihak-pihak yang dianggap paling rentan untuk melakukan tindak korupsi, dan pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam tindak pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak korupsi. Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten Ngawi relative bagus, rerata Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten Ngawi adalah sebesar 70,10 artinya jauh di atas nilai rerata nasional yang sebesar 60,8. Artinya nilai persepsi korupsi di Ngawi cukup bagus, hal ini mungkin didorong oleh belum pernah adanya kejadian korupsi di Kabupaten Ngawi yang sampai pada level nasional dan tidak mempengaruhi roda pemerintahan.

5. Referensi

Artikel Jurnal yang Ditinjau Sejawat:

- [1] Afonso, Antonio and Joao Tovar Jalles (2013). *Fiscal Composition and Long-term Growth. European Central Bank Eurosystem, Working Paper Series No.1518, March 2013.*
- [2] Ardani, Rezka Prakarsa; Joko Setiawan dan Rida Perwita Sari. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir.* <http://asp.trunojoyo.ac.id/> (diakses 12 Februari 2015).

Buku:

- [1] Adiningsih, Sri (2012), *Kordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan Kedepan*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).